

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal. Di Indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan setiap warga negara agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Selain itu, pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu amanat bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada UU No. 20 Tahun 2003 adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka Indonesia dapat menghadapi era global.

Kualitas sumber daya manusia menentukan kemajuan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, kualitas pendidikan suatu bangsa harus senantiasa ditingkatkan agar tercapai kemajuan pembangunan. Hal tersebut bertolak belakang dengan realita kehidupan di Indonesia. Indonesia mengalami krisis di berbagai bidang kehidupan. Krisis yang terjadi di Indonesia bersumber dari rendahnya kualitas SDM. Hal itu juga berarti, krisis

yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (E. Mulyasa, 2002: 3).

Pendidikan di Indonesia terdapat beberapa jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Namun pendidikan yang paling penting keberadaannya adalah pendidikan dasar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Collier, dkk. (Ibrahim Bafadal, 2003: 9) bahwa “sebagai satu bentuk satuan pendidikan dasar, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya”. Hal itu karena pendidikan di sekolah dasar merupakan dasar dari pendidikan yang selanjutnya, sehingga kualitas atau mutu pendidikan di sekolah dasar perlu ditingkatkan.

Mutu pendidikan sekolah dasar ditentukan oleh beberapa komponen. Direktorat Pendidikan Dasar (Ibrahim Bafadal, 2003: 25) menyatakan ada lima komponen yang menentukan mutu pendidikan, yaitu:

1. kegiatan belajar mengajar,
2. manajemen pendidikan yang efektif dan efisien,
3. buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai,
4. fisik dan penampilan sekolah yang baik, dan
5. partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu komponen yang menentukan mutu pendidikan adalah manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengubah pengelolaan pendidikan yang awalnya pendidikan dikelola

secara terpusat (sentralisasi) kemudian diarahkan pada desentralisasi. Bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan merupakan imbas dari kebijakan politik di tingkat makro tentang otonomi daerah ditandai dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004 yang hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab (E. Mulyasa, 2002: 5). Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pemerintah pusat dengan paradigma sentralistik, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangan bergeser kepada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan paradigma desentralistik.

Bentuk alternatif sekolah yang ditawarkan oleh pemerintah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan adalah model Manajemen Berbasis Sekolah yang sering disingkat menjadi MBS. MBS memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. MBS memiliki tujuan utama sebagaimana dinyatakan oleh E. Mulyasa, (2002: 13) bahwa

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi

masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan pernyataan di atas, sekolah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolahnya. Sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga dituntut kemandirian dan kreativitas dari sekolah dalam mengelola pendidikan. Di samping itu, sekolah dapat menjalin kerja sama yang erat dengan masyarakat dan pemerintah sehingga sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang besar.

Adanya Manajemen Berbasis Sekolah, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Diterapkannya MBS, juga diharapkan permasalahan-permasalahan terkait pendidikan dapat terselesaikan atau diminimalisasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurkolis (2003: 41) yang menyatakan bahwa “dengan diterapkannya MBS ini menjadi harapan banyak pihak agar krisis pendidikan akan bisa diselesaikan atau setidaknya diminimalisasi”.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2013: 1) menyatakan implementasi program MBS di Indonesia yang telah dievaluasi pada tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010 menunjukkan bahwa program pembinaan MBS memberikan dampak positif. Dampak positif dari program pembinaan MBS, antara lain:

1. peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel;

2. peningkatan mutu pendidikan;
3. menurunnya tingkat putus sekolah;
4. peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan strategi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM); dan
5. peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di Sekolah Dasar.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2013: 2) juga menyatakan bahwa “Berdasarkan monitoring dan evaluasi tentang implementasi MBS di SD, maka dapat dinyatakan bahwa SD di Indonesia bervariasi dalam implementasi MBS baik kuantitas maupun kualitasnya, serta terdapat berbagai masalah dan kendala implementasi MBS”. Berdasarkan catatan lapangan yang penulis peroleh pada waktu prapenelitian, bahwa setelah diadakannya sosialisasi MBS pada tahun 2002 di Banjarnegara, kemudian ditunjuk beberapa sekolah sebagai *piloting* dari MBS. Salah satu sekolah yang ditunjuk adalah SD Negeri 2 Merden. SD Negeri 2 Merden menerapkan MBS sejak tahun 2002/2003. SD Negeri 2 Merden merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Purwanegara. Pada tahun 2007, Kepala SD Negeri 2 Merden bersama tim membentuk Kecamatan Purwanegara sebagai kecamatan MBS sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Purwanegara menerapkan MBS. Namun, banyak sekolah di Kecamatan Purwanegara belum menerapkan MBS sebaik di SD Negeri 2 Merden. Hal itu dibuktikan dengan SD Negeri 2 Merden pernah menjadi pusat kegiatan *Public Hearing* DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan Program Rintisan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) Tahun 2008, sebagai sasaran Studi Banding Program Rintisan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dari Pemda dan DPRD Kabupaten Timika, Papua Tahun 2008, sebagai sasaran Studi Banding Program Rintisan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dari Pemda dan DPRD Kabupaten Mimika, Papua Tahun 2010, serta sebagai sasaran Studi Banding Program Rintisan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pembelajaran PAKEM melalui KKG dan KKKS Program BERMUTU tahun 2010/2011 dari: KKG Kecamatan Rakit, KKG Kecamatan Sigaluh, KKG Kecamatan Batur, KKKS Kecamatan Bawang, dan KKKS Kecamatan Punggelan. Dengan demikian, sekolah-sekolah lain di lingkungan tersebut belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya sebaik di SD Negeri 2 Merden.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan MBS di SD Negeri 2 Merden Banjarnegara. SD Negeri 2 Merden Banjarnegara sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha menerapkan model MBS dalam pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan penerapan MBS, sekolah lebih leluasa dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolah tersebut, guna menjaga eksistensinya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dan tingginya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada SD Negeri 2 Merden. Oleh karena

itu, penulis akan melakukan penelitian tentang penerapan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan MBS di SD Negeri 2 Merden.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Kualitas pendidikan di Indonesia rendah.
2. Banyak sekolah di Kecamatan Purwanegara belum menerapkan MBS sebaik di SD Negeri 2 Merden.
3. Sekolah-sekolah lain di lingkungan Kecamatan Purwanegara belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya sebaik di SD Negeri 2 Merden.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas supaya memperjelas permasalahan dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Negeri 2 Merden.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan MBS di SD Negeri 2 Merden Banjarnegara?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan MBS di SD Negeri 2 Merden?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Penerapan MBS di SD Negeri 2 Merden.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan MBS di SD Negeri 2 Merden.

F. Manfaat Penelitian

Secara terperinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembang khasanah keilmuan dan pengetahuan, terutama sekolah atau guru sekolah dasar yang belum optimal menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolahnya.
- b. Sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut yang sekiranya juga membahas tentang penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di suatu sekolah dasar khususnya, dan jenjang pendidikan yang lain pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru

Melalui kegiatan penelitian ini, para guru akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat.

Hal itu karena penerapan MBS di suatu sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

b. Bagi Kepala Sekolah

Melalui kegiatan penelitian ini, kepala sekolah akan semakin meningkatkan kinerjanya dalam mengelola pendidikan dengan model Manajemen Berbasis Sekolah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti terhadap penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.